



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENJA TAHUN 2026

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

PAINAN - 2025



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI PESISIR SELATAN,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2039, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap 3 bulan.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 28 Juli 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal, Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, Renja ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta ketenagakerjaan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas perencanaan ke depan. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita.

Pesisir Selatan, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
NIP. 19660113 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2025	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	24
	2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	41
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
	3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	70
BAB V	PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja	23
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	25
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	39
Tabel T-C.33 Program dan Kegiatan Pengangkat Daerah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perbahana rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Renstra yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggara tugas pokok dan fungsi yang diemban, penyusunan RKPD untuk tahun 2026 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk memwadahi hasil penjangkauan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrenbang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagai mana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan

pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II: EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN 2025

Berisikan uraian tentang isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV :RENCANA KERJA TAHUN 2026

Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju tahun 2027 berdasarkan pagu indikatif, sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.

BAB V: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada table T-C. 29 berikut ini :

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN s/d DENGAN TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)/2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Perangkat Daerah n- 1)/2024	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n- 1)/2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Ketercapaian Penunjang								

							N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten									
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n, Pengendalia n dan Evaluasi									
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah	20 dokumen	10 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	20 dokumen	100%	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan									
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orag yang menerima gaji dan tunjangan	32 orang	32 orang	33 orang	33 orang	100%	29 orang	29 orang	100%	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengaduan/s aran yang ditindaklanju ti									

							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	12 paket	12 paket	100%	6 paket	6 paket	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	4 paket	4 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
							Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

							Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia											
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-		2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja											
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%			
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%			

							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik										
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	10 unit	10 unit	100%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-		2 unit	2 unit	100%	4 unit	4 unit	100%		
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	100%		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM											

							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat									
							Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatanny a									
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan da Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatanny a	15 unit usaha	15 unit usaha	-	-	-	30 unit usaha	30 unit usaha	100%	
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat									
							Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatanny a untuk									

							Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota											
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-	-	20 unit usaha	20 unit usaha	100%	-	-	-			
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat											
							Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi											
							Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan	10 unit usaha	10 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100%	20 unit usaha	20 unit usaha	100%			

								n, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota											
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi Sehat										
								Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/	Persentase Koperasi yang dilatih										
								Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	-	-	150 unit usaha	150 unit usaha	100%	56 unit usaha	56 unit usaha	100%		
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset UMK										

								Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro menjadi wirausaha									
								Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	5 unit usaha	5 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100%	15 unit usaha	15 unit usaha	100%	
									Jumlah UMK	50 unit usaha	50 unit usaha	1000 unit usaha	1000 unit usaha	100%	300 unit usaha	300 unit usaha	100%	
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset UMK									
								Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil									

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

							Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 unit usaha	5 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	10 unit usaha	10 unit usaha	100%
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
							PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	dokumen rencana tenaga kerja								
							Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja								
							Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten								
							Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan	Terlaksanaan ya								

								berdasarkan Unit Kompetensi	pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi								
								Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	20 orang	20 orang	-	-	-	48 orang	48 orang	100%-
								Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina								
								Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	10 LPKS	10 LPKS	10 LPKS	100%		10 LPKS	10 LPKS	100%
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatka n								

							Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penyebarluasan pasar kerja									
							Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	1100 orang	1089 orang	2500 orang	1344 orang	53,76%		1250 orang	986 orang	78,88%
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan									
							Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)									

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

							Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	10 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	4 perkara	80%
							Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1202 orang	1202 orang	-	-	-	1249 orang	1202 orang	96,55

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dinas yang menyelenggarakan Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Layanan Urusan Pilihan yaitu Urusan Tenaga Kerja.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel T-C.30. dibawah ini :

TABEL T-C. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai RB Perangkat Daerah		B (65)								
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		A	A (85)	A (87)	A (84,63)	A (84,63)	A (87,20)	A (87,50)	A (88)	
3	Nilai Kematangan Inovasi PD		100	100	80	45	45	87	100	100	
4	Persentase Koperasi Berkualitas		20%	35%	36%	33,97%	33,97%	26,86%	35%	36%	
5	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha		75%	78%	80%	74,95%	74,95%	80,04%	78%	80%	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,50%	4,6%	4,60%	4,75%	4,75%	*5,06%	4,6%	4,60%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Maraknya masyarakat yang meminjam uang untuk tambahan modal kepada perusahaan pinjaman dana illegal, baik secara online maupun offline.
2. Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui koperasi.
3. Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat daerah yang bersangkutan review rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C. 31. sebagai berikut:

TABEL T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOT		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	12 bulan	6.977.423.858	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		4.095.090.770	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		45.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		15.262.000	

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	15.262.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 bulan	3.750.323.858	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan		3.686.629.843	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.626.794.334	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.619.649.843	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	123.529.524	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	66.980.000	

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	12 bulan	217.100.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti		77.732.450	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	7.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	5.835.154	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	34.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	15.025.238	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	22.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	10.555.908	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	8.210.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	4.371.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordoinasi dan konsultasi	12 laporan	135.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordoinasi dan konsultasi	12 laporan	41.945.150	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia		120.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia			
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	120.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan		210.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		258.465.164	

			Tenaga Kerja								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	62.487.745	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	155.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	195.977.419	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		178.084.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	9 Unit	83.840.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	7 Unit	51.501.313	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	15.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	5.500.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	500.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM					
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi Sehat		75.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi Sehat		40.589.950	

	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya		75.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya		40.589.950	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 koperasi	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 koperasi	40.589.950	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah Koperasi Sehat		150.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah Koperasi Sehat		5.135.000	

	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		150.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		5.135.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit Usaha	150.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	5.135.000	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah Koperasi Sehat		750.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah Koperasi Sehat	-	-	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		750.000.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi Yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	-	

	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	umlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 koperasi/U MKM	750.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pesisir Selatan	umlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	-	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Peningkatan Omset UMK		250.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Peningkatan Omset UMK		16.880.000	
	Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		250.000.000	Kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dngan para pemangku kepentingan		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		16.880.000	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	250.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	16.880.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	35.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya		15.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya			
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		15.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil			
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	25 Unit Usaha	24.412.090	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	25 Unit Usaha	24.382.728	

			Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				546.999.740	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten		300.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten		543.500.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		250.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		250.000.000	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	41 Orang	250.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	41 Orang	250.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina		35.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina			

	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	37 Lembaga	50.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	37 Lembaga	293.500.000	
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	2000 Orang	60.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	2000 Orang	18.940.750	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	2000 Orang	60.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	2000 Orang	18.940.750	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	60.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	18.940.750	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	125.000.000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	-	

	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 Orang	60.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	-	
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan	-	450.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perselisihan Industrial Yang Diselesaikan		128.524.500	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0	450.000.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		128.524.500	

	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	45.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	3.524.500	
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1000 Orang	250.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	1000 Orang	125.000.000	
TOTAL					9.232.423.858					4.873.043.698	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL T-C.3.2.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Koto XI Tarusan	50.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	IV Jurai dan Batang Kapas	200.000.000	
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				

	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	IV Jurai dan Batang Kapas	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	150.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran visi, misi Bupati. Dalam perkembangan dalam satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain berkaitan dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling mendukung.

Kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Renstra Kementerian Koperasi, UKM, Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat sebagai berikut:

- a. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju, Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.

2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global .
3. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dalam periode 2020-2025. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Misalnya keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasinya tujuan, maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki. Selain itu perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan

strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan.

Adapun korelasi antara misi dan tujuan jangka menengah atau untuk lima tahun ke depan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Misi dan Sasaran

Misi	Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Berdaya Saing
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja
Misi 3 : Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera	- Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Koperasi - Meningkatkan UMKM Naik Kelas

3.2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja yang Menggambarkan Pencapaian Renstra

Adapun sasaran jangka menengah atau untuk lima tahun kedepan dari tujuan yang telah ditentukan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat berikut ini :

Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	- Rasio Kewirausahaan Daerah - Kontribusi UMKM terhadap PDRB

dan berdaya saing untuk meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja serta kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	- Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
2. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang akuntabel dan berdaya saing	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai Kematangan Inovasi
3. Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - Pesentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
4. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Riil
5. Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional. Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan para stakeholders pada acara Forum

OPD, disepakati sebanyak 8 program, 15 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Adapun rincian rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Program Penempatan Tenaga

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

4. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel T-C.33 berikut ini :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Pesisir Selatan

Tahun 2026

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA						5.381.874.574,00					0,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.381.874.574,00					0,00		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						860.550.008,00					0,00		
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						0					0,00		
2	07	02	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						0					0,00		
2	07	02	201	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
						Dokumen rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten pesisir selatan	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen	0,00	

[illegible]

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						-	Jumlah Pengadaa n dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	-	-	-	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
2	0	0	2				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						63.151.330,00						0,00
2	0	0	2	0			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
							Jumla h LPKS yang dilatih	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah LPKS yang dibina	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	10 LPKS	26 Lembaga	10 LPKS	63.151.330,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juml ah Lem bag a Pela tihan Kerj a Swa sta yang Dibi na	26 Le m ba ga	0,00
2	0	0					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							24.648.500,00					0,00
2	0	0	2				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							24.648.500,00					0,00
2	0	0	2	0			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190 orang	2500 Orang	2500 orang	24.648.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	0,00
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							422.750.400,00					0,00
2	0	0	2			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0,00					0,00
2	0	0	2	0		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan												
						-	0	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 0	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	0,00

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						-	Jumlah Perusaha an yang Melaksana kan Pengesah an Peraturan Perusahaa n yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan TerdFTAR di WLKP Online	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	-	15 Perusahaa n	-	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Juml ah Peru saha an yang Mela ksan akan Pen gesa han Pera tura n Peru saha an yang Terk ait den gan Hub ung an Indu strial dan Terd aftar di WLK P Onli ne	15 Pe ru sa ha an	0,00
2	0	0	2	0	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												

						-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	0,00
2	0	0	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								422.750.400,00					0,00
2	0	0	2	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

			2			Persentas e perselisihan industrial yang di selesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Terfasilitasin ya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Pesisir Selatan	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,15 persen	5 Perkar a	116 peru sah aan	422.750.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juml ah Perk ara Pers elisi han yang Ters eles aikaa n	5 Pe rk ar a	0,00
2	07	05	2022	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliiasi													
						Persentas e perselisiha n industrial yang di selesaikan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Terfasilitasin ya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Pesisir Selatan	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,15 persen	10 Asosi asi dan Serik at Peker ja	116 peru sah aan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juml ah Aso siasi Pen gusa ha dan Seri kat Pek erja yang Dive rifika si	10 As osi asi da n Se rik at Pe ke rja	0,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								4.481.034.566,00					0,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.163.753.594,00					0,00
2	17	01	2021		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40.290.000,00					0,00
2	17	01	2021	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	100 %	5 Dokumen	5 dokumen	40.290.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0,00
2	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.620.484.174,00					0,00
2	1	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	33 Orang /bulan	-	3.560.124.174,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang /bulan	0,00
2	1	0	2	0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	60.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00
2	1	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3.950.000,00					0,00
2	1	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	0,00
2	1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-		-	3.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
2	1	0	2				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.332.000,00					
2	1	0	2	0			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
						-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-		-	2.332.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
2	1	0	2				Administrasi Umum Perangkat Daerah						131.592.750,00					0,00
2	1	0	2	0			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	2.933.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	0,00

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

																	or yang Dise diak an		
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	7	1	0	0		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-		-	14.086.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
			6	0															
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	7	1	0	0		-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-		-	1.656.852,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00
			6	0															
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	7	1	0	4		Persentas e ketercapai an penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	10.065.480,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juml ah Pak et Bah an Logi stik Kant or yang Dise diak an	12 Pa ke t		0,00
			6	0															
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	7	1	0	5															
			6	0															

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	9.983.748,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
	7	1	0	6		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00
2	1	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	7	1	0	8														

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	3.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00
2	17	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian administrasi umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	85.786.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00
2	17	01	206	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	-		-	1.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
2	17	01	206	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					0,00

			7															
2	17	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentas e ketercapai an penunjang an urusan pemerintah an daerah kabupaten	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	-	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Juml ah Unit Pera latan dan Mesi n Lain nya yang Dise diak an	2 Un it	0,00
2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								281.610.670,00					0,00
2	17	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentas e ketercapai an penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	undefin ed undefin ed	12 Lapor an	100 %	74.040.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Juml ah Lap oran Pen yedi aan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan Listri k yang Dise	12 La po ra n	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Semua Kel/Desa					Alokasi Umum					
2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	37.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0,00
2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	100 %	63 Unit	100 %	4.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesi	63 Unit	0,00

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						pemerintah an daerah kabupaten		penunjang urusan pemerinta han daerah							n Lain nya yang Dipe lihar a		
2	1	0	2	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	7	1	0	9		Persentas e ketercapai an penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Terlaksan anya pemlihara an barang milik daerah penunjang urusan pemerinta han daerah	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Juml ah Sara na dan Pras aran a Pen duku ng Ged ung Kant or atau Ban gun an Lain nya yang Dipe lihar a/Dir eha bilita si	2 Un it	0,00
2	1	0	2	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	7	1	0	9		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua	-		-	40.844.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			0,00

							Dipelihara/Direhabilitasi		Kel/Desa					Umum				
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								91.100.166,00					0,00
2	17	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								91.100.166,00					0,00
2	17	03	201	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit Usaha	-	91.100.166,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koperasi yang Menuhi Peraturan Perundang-an Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	30 Unit Usaha	0,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								0					0,00
2	17	04	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0					0,00
2	17	04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													

2026

			0 1			Jumlah koperasi sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 koperasi	20 Unit Usaha	20 kope rasi	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Juml ah Unit Usa ha Kop erasi yang Tela h Dila kuka n Peni laian Kes ehat an	20 Un it Us ah a	0,00
2	1 7	0 5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								0					0,00
2	1 7	0 5	2 . 0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								0					0,00
2	1 7	0 5	2 . 0 1	0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
						Jumlah koperasi sehat	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah pengurus/pengelola koperasi/UMK yang mengikuti BIMTEK/Diklat	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 koperasi	60 Ora ng	150 kope rasi/ UM K	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Juml ah SD M yang Me mah ami Pen geta hua n Perk oper asia n	60 Or an g	0,00
2	1 7	0 5	2 .		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota								0,00					0,00

			0 2															
2	1 7	0 5	2 0 2	0 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM													
						-	0	-	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	90 0	-	0,00	-		0	90 0	0,00
2	1 7	0 6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								195.430.856,00					0,00
2	1 7	0 6	2 0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								195.430.856,00					0,00
2	1 7	0 6	2 0 1	0 1	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota													
						jumlah koperasi sehat	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 koperasi	20 Unit Usaha	118 koperasi 20 operasi	195.430.856,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pen	20 Unit Usaha	0,00

								koperasi, kewenang an kabupaten /kota Terlaksan anya pemberda yaan peningkat an produktifit as, nilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiaya an, penguatan kelembag aan, penataan manajeme n, standarisa si dan restrukturi sasi usaha koperasi kewenang an kabupaten /kota						guat an Kele mba gaa n, Pen ataa n Man ajem en, Stan daris asi, dan Rest rukt urisa si Usa ha Kop erasi Kew ena nga n Kab upat en/K ota		
2	1	0						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		15.749.650,00						0,00
2	1	0	2					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		15.749.650,00						0,00
2	1	0	2	0				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
	7	7	1	1												

Rencana Kerja (RENJA) | 2026

						Persentase peningkatan omset UMK	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang bermitra dengan perusahaan atau badan usaha lainnya	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 %	30 Unit Usaha	30 UMK	15.749.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	0,00
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							15.000.300,00					0,00
2	1	0	2			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							15.000.300,00					0,00
2	1	0	2	0		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi												
						Jumlah UMKM yang meningkat skalanya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah bantuan sarana UMKM	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 UMKM	20 Unit Usaha	37 UMK	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	20 Unit Usaha	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 terdapat 8Program dan 15 Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia, perekonomian masyarakat. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karena itu segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan SDM, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2025.
4. Renja ini merupakan sarana pendukung pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam Renja telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan

kendala di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :

1. Pendelegasian beberapa wewenang kepada Unit Kerja Layanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
2. *Law enforcement*/sanksi hukum yang lemah.

Walaupun demikian dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tetap bertekad akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembankan. Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

BUPATI PESIR SELATAN



HENDRAJONI